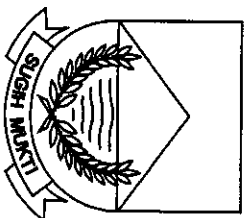


# BERITA

# DAERAH



**KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR 39**

**TAHUN 2010**

**PERATURAN BUPATI CIANJUR**

**NOMOR 33 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 02 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010**

**BUPATI CIANJUR,**

Menimbang

- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2010 dan telah diundangkan dalam Berita Daerah tanggal 19 Mei 2001 Nomor 26 Tahun 2010;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.07/2010, 114/PMK.07/2010, 117/PMK.07/2010, dan 118/PMK.07/2010, Pemerintah Kabupaten Cianjur mendapat tambahan untuk alokasi dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah, dana percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan, dana sementara tunjangan profesi guru PNS dan alokasi dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah;
- c. bahwa untuk mengakomodir dana-dana sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sambil menunggu ditetapkannya perubahan APBD Tahun Anggaran 2010, perlu merubah kembali Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

Jalan Siti Jenab No. 31 Telepon (0263) 261892 Fax. (0263) 260981

Cianjur 43211 Jawa Barat

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-370A/MK.7/2010, S-376/MK.7/2010, S-380/MK.7/2010, dan S-381/MK.7/2010, perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 harus ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ; 3988);
4. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2001 tentang kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara RK Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penujangan Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunitas dan Dana Operasional;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Penguatan Infrastruktur Dan Prasarana Daerah Tahun Anggaran 2010;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Tahun Anggaran 2010;

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Sementara Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2010;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal Dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2010;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Sementara Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2010;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 08 Seri D1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 04 Seri D);
35. Peraturan Daerah Cianjur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2006 - 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 12 Seri D);
36. Peraturan Daerah Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 02 Seri D);
40. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 26);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 02 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

## Pasal 1

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2010, dan diundangkan dalam Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 03 tanggal 20 Januari 2010 dan telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 yang telah diundangkan dalam Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 26 diubah :

Pasal 1, diubah sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, terdiri atas :

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. Pendapatan :                  |                              |
| a. Pendapatan asli daerah        | Rp 108.385.766.587,02        |
| b. Dana perimbangan              | Rp 1.084.244.449.897,00      |
| c. Lain-lain pendapatan yang sah | Rp <u>223.829.982.094,00</u> |
| Jumlah pendapatan                | Rp 1.416.460.198.578,02      |

## 1. Belanja :

## a. Belanja tidak langsung :

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1) Belanja pegawai          | Rp 842.021.777,400,00          |
| 2) Belanja bunga            | Rp 1.637.750.000,00            |
| 3) Belanja subsidi          | Rp 4.372.006.500,00            |
| 4) Belanja hibah            | Rp 105.126.979.200,00          |
| 5) Belanja bantuan sosial   | Rp 34.514.122.500,00           |
| 6) Belanja bagi hasil       | Rp 922.000.000,00              |
| 7) Belanja bantuan keuangan | Rp 57.276.000.000,00           |
| 8) Belanja tidak terduga    | Rp 5.139.178.008,02            |
| <b>Jumlah</b>               | <b>Rp 1.051.009.813.608,02</b> |

## b. Belanja langsung :

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1) Belanja pegawai         | Rp 29.832.130.200,00           |
| 2) Belanja barang dan jasa | Rp 204.575.206.505,00          |
| 3) Belanja modal           | Rp 205.532.699.542,00          |
| <b>Jumlah</b>              | <b>Rp 439.940.036.247,00</b>   |
| <b>Jumlah belanja</b>      | <b>Rp 1.490.949.849.855,02</b> |
| <b>Surplus/(defisit)</b>   | <b>Rp (74.489.651.277,00)</b>  |

## 3. Pembiayaan :

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| a. Penerimaan                 | Rp 102.919.032.979,00       |
| b. Pengeluaran                | Rp 28.429.381.702,00        |
| <b>Jumlah pembiayaan neto</b> | <b>Rp 74.489.651.277,00</b> |

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 0,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

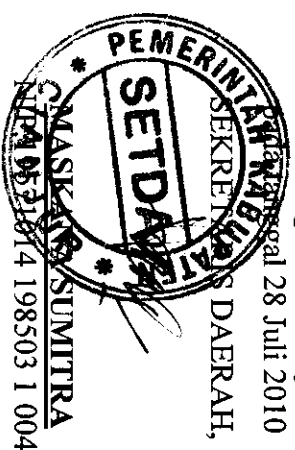
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 28 Juli 2010  
BUPATI CIANJUR,

Cap/td.-

**TJETTJEP MUCHTAR SOLEH**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 28 Juli 2010



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2010 NOMOR 39.



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 33 TAHUN 2010

TENTANG :

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 02 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

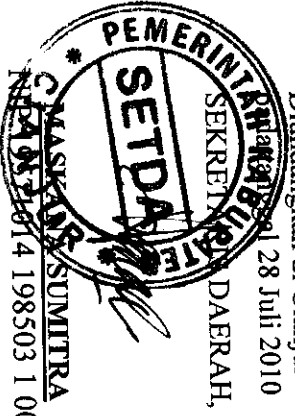
RINGKASAN

| NOMOR URUT               | URAIAN   | SETELAH PERUBAHAN      |
|--------------------------|--|------------------------|
| 1                        | 2  | 3                      |
| 1                        | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>   |                        |
| 1                        | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>  | <b>108.385.766,4</b>   |
| 1                        | Pajak daerah   | 22.661.559,3           |
| 1                        | Retribusi daerah   | 20.365.066,0           |
| 1                        | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan                      | 7.843.587,3            |
| 1                        | Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah                              | 57.515.553,7           |
| <b>1</b>                 | <b>Dana Perimbangan</b>  | <b>1.084.244.449,8</b> |
| 1                        | Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak                           | 104.980.130,8          |
| 1                        | Dana alokasi umum  | 877.993.919,0          |
| 1                        | Dana alokasi khusus  | 101.270.400,0          |
| <b>1</b>                 | <b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah</b>                            | <b>223.829.982,0</b>   |
| 1                        | Hibah  | 3.000.000,0            |
| 1                        | Dana darurat   | 38.146.367,1           |
| 1                        | Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah lainnya | 120.577.274,9          |
| 1                        | Dana penyesuaian dan otonomi khusus                                    | 62.106.340,0           |
| 1                        | Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya          |                        |
| <b>Jumlah Pendapatan</b> |  | <b>1.416.460.198,5</b> |



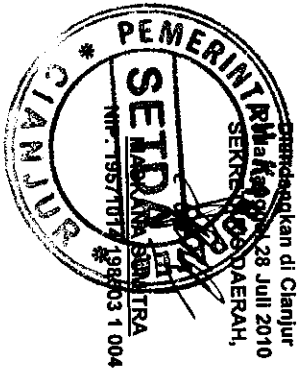
| 1 | 2 | 3                 |
|---|---|-------------------|
|   |   |                   |
| 3 | 1 | 102.919.032.979,0 |
|   |   |                   |
| 3 | 1 | 0,0               |
| 3 | 1 | 0,0               |
| 3 | 1 | 0,0               |
| 3 | 1 | 0,0               |
| 3 | 1 | 0,0               |
| 3 | 1 | 0,0               |
| 3 | 1 | 0,0               |
| 3 | 1 | 0,0               |
| 3 | 1 | 0,0               |
| 3 | 1 | 0,0               |
| 3 | 1 | 0,0               |
| 3 | 1 | 0,0               |
| 3 | 1 | 0,0               |
| 3 | 1 | 0,0               |
| 3 | 1 | 0,0               |
| 3 | 1 | 0,0               |
| 3 | 1 | 0,0               |
| 3 | 1 | 0,0               |
| 3 | 1 | 0,0               |
| 3 | 1 | 0,0               |
| 3 | 1 | 0,0               |
| 3 | 1 | 0,0               |
| 3 | 1 | 0,0               |
| 3 | 1 | 0,0               |
| 3 | 1 | 0,0               |
| 3 | 1 | 0,0               |
| 3 | 1 | 0,0               |
| 3 | 1 | 0,0               |
| 3 | 1 | 0,0               |
| 3 | 1 | 0,0               |
| 3 | 1 | 0,0               |
| 3 | 1 | 0,0               |
| 3 | 1 | 0,0               |
| 3 | 1 | 0,0               |
| 3 | 1 | 0,0               |
| 3 | 1 | 0,0               |
| 3 | 1 | 0,0               |

Diundangkan di Cianjur  
 pada tanggal 28 Juli 2010  
 Bupati Cianjur,  
 Tjetjep Muchtari Soleh



Ditetapkan di Cianjur  
 pada tanggal 28 Juli 2010  
 BUPATI CIANJUR,  
 Cap/ttd.-  
 TJETJEP MUCHTAR SOLEH

| KODE REKENING                    | U R A I A N                                   | JUMLAH<br>(Rp) | PENJELASAN |
|----------------------------------|---|----------------|------------|
|                                  | <b>1</b>                                      | <b>2</b>       | <b>3</b>   |
| 1.18 1.01.01 20 23 5 2 2 07      | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir       | 32.040.000,00  |            |
| 1.18 1.01.01 20 23 5 2 2 07 02   | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat             | 32.040.000,00  |            |
| 1.18 1.01.01 20 23 5 2 2 08      | Belanja Sewa Sarana Mobilitas                 | 16.200.000,00  |            |
| 1.18 1.01.01 20 23 5 2 2 08 01   | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat           | 16.200.000,00  |            |
| 1.18 1.01.01 20 23 5 2 2 11      | Belanja Makanan dan Minuman                   | 25.392.500,00  |            |
| 1.18 1.01.01 20 23 5 2 2 11 01   | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai    | 24.920.000,00  |            |
| 1.18 1.01.01 20 23 5 2 2 11 02   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat             | 472.500,00     |            |
| 1.18 1.01.01 20 23 5 2 2 14      | Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu | 13.500.000,00  |            |
| 1.18 1.01.01 20 23 5 2 2 14 04   | Belanja Pakaian Olah Raga                     | 13.500.000,00  |            |
| 1.18 1.01.01 20 23 5 2 2 3       | Belanja Modal                                 | 2.600.000,00   |            |
| 1.18 1.01.01 20 23 5 2 2 3 31    | Belanja Modal Pengadaan Alat Olahraga         | 2.600.000,00   |            |
| 1.18 1.01.01 20 23 5 2 2 3 31 01 | Belanja Modal Pengadaan Alat Olahraga         | 2.600.000,00   |            |



Ditandatangani di Cianjur  
Pada Tanggal 28 Juli 2010

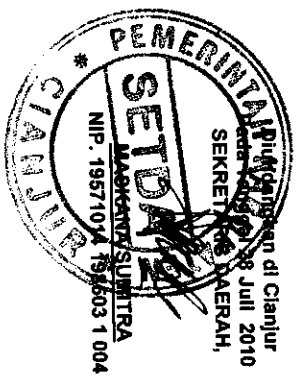
SEKRETARIS DAERAH,

Cap/trd.-

Ditandatangani di Cianjur  
Pada Tanggal 28 Juli  
BUPATI CIANJUR

TJETJEP MUCHTAR S

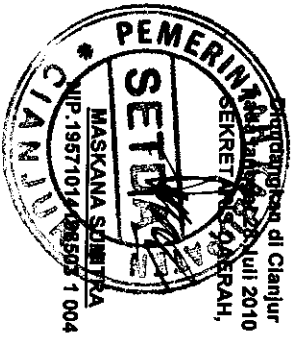
| KODE REKENING |         |    |    |   |   |   |    |    |    | U R A I A N   | JUMLAH ANGGARAN  | PENJELASAN |
|---------------|---------|----|----|---|---|---|----|----|----|---|------------------|------------|
| 1             |         |    |    |   |   |   |    |    |    | 2   | 3                | 7          |
| 2.03          | 1.03.01 | 17 | 08 | 5 | 2 | 2 | 03 |    |    | Belanja Jasa Kantor                                   | 15.000.000,00    |            |
| 2.03          | 1.03.01 | 17 | 08 | 5 | 2 | 2 | 03 | 04 |    | Belanja Jasa Pengunmuan Lelang                        | 15.000.000,00    |            |
| 2.03          | 1.03.01 | 17 | 08 | 5 | 2 | 2 | 06 |    |    | Belanja Cetak dan Penggandaan                         | 2.826.850,00     |            |
| 2.03          | 1.03.01 | 17 | 08 | 5 | 2 | 2 | 06 | 02 |    | Belanja Penggandaan                                   | 2.826.850,00     |            |
| 2.03          | 1.03.01 | 17 | 08 | 5 | 2 | 2 | 11 |    |    | Belanja Makanan dan Minuman                           | 5.625.000,00     |            |
| 2.03          | 1.03.01 | 17 | 08 | 5 | 2 | 2 | 11 | 01 |    | Belanja Makanan dan Minum Harian Pegawai              | 1.050.000,00     |            |
| 2.03          | 1.03.01 | 17 | 08 | 5 | 2 | 2 | 11 | 02 |    | Belanja Makanan dan Minum Rapat                       | 4.575.000,00     |            |
| 2.03          | 1.03.01 | 17 | 08 | 5 | 2 | 2 | 15 |    |    | Belanja Perjalanan Dinas                              | 25.215.000,00    |            |
| 2.03          | 1.03.01 | 17 | 08 | 5 | 2 | 2 | 15 | 01 |    | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah                 | 16.395.000,00    |            |
| 2.03          | 1.03.01 | 17 | 08 | 5 | 2 | 2 | 15 | 02 |    | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah                  | 8.820.000,00     |            |
| 2.03          | 1.03.01 | 17 | 08 | 5 | 2 | 2 | 3  |    |    | Belanja modal   | 2.934.750.000,00 |            |
| 2.03          | 1.03.01 | 17 | 08 | 5 | 2 | 2 | 3  | 25 |    | Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon | 2.934.750.000,00 |            |
| 2.03          | 1.03.01 | 17 | 08 | 5 | 2 | 2 | 3  | 25 | 01 | Belanja modal pengadaan Instalasi Listrik             | 2.934.750.000,00 |            |



Ditetapkan di Cianjur  
 Pada tanggal 28 Juli 2  
 BUPATI CIANJUR  
 Cap/td.-  
 TJETJEP MUCHTAR SA



| KODE REKENING | 1          |    |    |   |   |   |    |    |  |  | U R A I A N  | 2 | JUMLAH<br>(Rp)    | 3 | PENJELASAN | 4 |
|---------------|------------|----|----|---|---|---|----|----|--|--|--|---|-------------------|---|------------|---|
| 1.20          | 1.20.03.00 | 00 | 00 | 6 | 1 | 3 |    |    |  |  | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                      |   | 0,00              |   |            |   |
| 1.20          | 1.20.03.00 | 00 | 00 | 6 | 1 | 3 | 01 |    |  |  | Penjualan Saham Perbankan  |   | 0,00              |   |            |   |
| 1.20          | 1.20.03.00 | 00 | 00 | 6 | 1 | 3 | 01 | 02 |  |  | Lembaga Keuangan   |   |                   |   |            |   |
| 1.20          | 1.20.03.00 | 00 | 00 | 6 | 2 |   |    |    |  |  | Pengeluaran Pembiayaan Daerah  |   |                   |   |            |   |
| 1.20          | 1.20.03.00 | 00 | 00 | 6 | 2 | 3 |    |    |  |  | Pembayaran Pokok Utang (DBH PROV/SILPA/DBH/SAHAM)                    |   | 28.429.381.702,00 |   |            |   |
| 1.20          | 1.20.03.00 | 00 | 00 | 6 | 2 | 3 | 03 |    |  |  | Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bank |   | 21.350.000.000,00 |   |            |   |
| 1.20          | 1.20.03.00 | 00 | 00 | 6 | 2 | 3 | 03 | 01 |  |  | Bank Muamalat  |   | 21.350.000.000,00 |   |            |   |
| 1.20          | 1.20.03.00 | 00 | 00 | 6 | 2 | 3 | 05 |    |  |  | Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo kepada Pemerintah         |   | 296.500.000,00    |   |            |   |
| 1.20          | 1.20.03.00 | 00 | 00 | 6 | 2 | 3 | 05 | 02 |  |  | Pemerintah Pusat   |   | 296.500.000,00    |   |            |   |
| 1.20          | 1.20.03.00 | 00 | 00 | 6 | 2 | 3 | 11 |    |  |  | Pembayaran Hutang kepada Pihak Ketiga                                |   | 6.782.881.702,00  |   |            |   |
| 1.20          | 1.20.03.00 | 00 | 00 | 6 | 2 | 3 | 11 | 01 |  |  | Pembayaran Hutang kepada Pihak Ketiga                                |   | 6.782.881.702,00  |   |            |   |



Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 28 Juli 2010  
BUPATI CIANJUR

Cap/td.-

TJUTJEP MUGHTAR SOLEH